



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**RABU, 30 MEI 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

# Pemkot Kembali Gagal WTP

**BENGKULU, BE** - Pemerintah Kota Bengkulu kembali gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun ini.

Kegagalan ini pun mendapat sorotan

dari DPRD Kota Bengkulu. Dewan meminta Pemkot segera melakukan pembenahan besar-besaran, baik dari pengelolaan keuangan, pengelolaan aset serta pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dipekerjakan.

"Administrasi keuangannya belum rapi, dan penataan aset sampai kini belum selesai-selesai di beberapa OPD, maka harus ada pembenahan besar," kata Wakil Ketua II DPRD Kota, Teuku Zulkarnain SE, kemarin (29/5). Diakui Teuku, selama ini

belum ada semangat dari Pemerintah Kota Bengkulu untuk mengelola aset-aset terbengkalai, kemudian lemahnya pengelolaan keuangan sehingga menurutnya wajar saja jika WTP sulit diraih.

► *Baca Pemkot...Hal*

Padahal dari pengamatan dewan, banyak aset yang selama ini dibiarkan terbengkalai seolah-olah tidak dipedulikan, seperti aset kendaraan, lahan, gedung, dan sebagainya. Sedangkan Pemkot sendiri tidak pernah mengusulkan anggaran apapun ke dewan untuk pengelolaan aset terbengkalai tersebut.

"Selama ini mereka pihak aset kota tidak pernah merincikan apa yang harus dilakukan, misal penghapusan

aset atau penambahan anggaran pengelolaan aset. Nah, selama ini tidak pernah ada usulan seperti itu, akhirnya jadi temuan BPK, termasuk pengelolaan keuangan," ungkap Politisi PAN ini.

Teuku juga mengaku bahwa selama ini Pemkot belum bisa menjaga komunikasi baik dengan pihak BPK. Maka dari itu, ke depan ia berharap agar Pemkot dapat meminta pendampingan dalam pengelolaan keuangan, sehingga

mengetahui sisi-sisi mana yang harus disempurnakan, sebelum dijadikan temuan.

"Selama ini Pemkot itu buta sisi-sisi mana saja yang harus dibenahi. Mereka secara intens dan continiu harus berkoordinasi dengan BPK, BPKP, biar tahu apa yang harus dilakukan," tandasnya.

Sementara itu, juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota, Heri Ifzan SE mengungkapkan bahwa aset milik pemerintah kota yang

terbengkalai mencapai ratusan miliar. Bahkan banyak aset yang sudah sangat lama tidak diurus sehingga tanpa disadari aset tersebut diperjualbelikan bahkan diambil untuk kepentingan pribadi para oknum.

"Kita lihat masih banyak pula kendaraan dinas yang sampai kini belum jelas. Kami melihat pemda kota itu memang tidak ada keseriusan dalam mengurus aset ini, maka mustahil kita dapat WTP," sampai Heri. (805)